

# Jurnal

# MIMBAR

Volume 3 No. 1 Januari Maret 2014

ISSN : 2252 - 5270

KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PENAGO II KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA  
By. Kasdi, S.Sos., MM

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA TALANGLEAK I KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG  
Edi Darmawati, S.Sos., M.Si

KEMAMPUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (RPD) DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi di Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Ilir Kabupaten Kaur)  
Drs. Herman, MM

ANALISIS RESPONSIVE GENDER MODEL HARVARD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Suatu Studi mengenai Proses Partisipasi Perempuan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)  
A. Aziz Zulfakim, S.Sos., M.Si

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talu Kabupaten Seluma)  
Samudri Azzam, SE., MM

EVALUASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA  
Sudhito E. Jendri, S.Pd., M.Si

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA TALANG KABUKITAN KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA  
Drs. Salehin, MM



Diterbitkan oleh:  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<p>KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PENAGO II KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA</p> <p><b>By. Kasdi, S.Sos., MM</b></p>	1 – 8
<p>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA TALANG LEAK I KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG</p> <p><b>Edi Darmawi, S.Sos., M.Si</b></p>	9 – 17
<p>KEMAMPUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi di Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Ilir Kabupaten Kaur)</p> <p><b>Drs. Herman, MM</b></p>	18 – 26
<p>ANALISIS RESPONSIVE GENDER MODEL HARVARD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Suatu Studi mengenai Proses Partisipasi Perempuan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)</p> <p><b>A. Aziz Zuhakim, S.Sos., M.Si</b></p>	27 – 35
<p>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)</p> <p><b>Samsul Akmal, SE., MM</b></p>	36 – 46
<p>EVALUASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 HULU PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA</p> <p><b>Soehito Efendi, S.Pd., M.Si</b></p>	47 -57
<p>IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA TALANG KABU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA</p> <p><b>Drs. Solichin, MM</b></p>	58 – 66

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP)  
DI DESA TALANG LEAK I KECAMATAN BINGIN KUNING  
KABUPATEN LEBONG**

**OLEH :**

**Edi Darmawi, S.Sos., M.Si**

**ABSTRAK**

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini informan awal dipilih/ditentukan melalui cara purposive (*purposive sampling*). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya: 1) Masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Talang Leak I, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka; 2) Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP.; dan 3) Kepala Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP tersebut, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

*Keyword:* Partisipasi Masyarakat, PNPM-MP dan Pembangunan Desa

**A. Pendahuluan**

Konsep pembangunan di era otonomi daerah saat ini hendaknya memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk melibatkan dirinya dari setiap proses pembangunan itu sendiri.

Adapun Proses yang dimaksudkan diatas, yakni bukan hanya pada tahap perencanaan saja, tetapi juga pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan, pengawasannya, serta tahap evaluasi hasil pembangunannya. Dengan diterbitkannya berbagai peraturan oleh pemerintah untuk mendukung konsep tersebut, maka diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai objek pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaksana pembangunan.

Maka pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87).

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Dengan adanya program-program pembangunan partisipatif yang diinisiasikan oleh pemerintah, diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

PNPM-MP merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan hajat hidupnya yang berkualitas dan dapat menjadi forum untuk memperjuangkan aspirasi serta kebutuhan mereka untuk dapat mempengaruhi keputusan yang selama ini terpusat. Sedangkan salah satu prinsip yang mendasar di dalam pelaksanaan PNPM-MP tersebut adalah prinsip partisipatif.

Simpulan dari hasil penelitian awal di lapangan, maka setelah adanya program PNPM-MP di desa Talang Leak I, semangat partisipasi masyarakat masyarakat kembali tumbuh dengan munculnya semangat gotong royong yang digalakan oleh masyarakat untuk memenuhi aspek-aspek di dalam pembangunan.

Berdasarkan dari uraian yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang diberi judul: "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong".

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong?"

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi atau pelaksanaan program merupakan usaha mendasar dalam pembangunan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (1991:51) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Sedangkan Uodji dalam Solichin Abdul Wahab (1991:45) mengatakan bahwa:

*"the execution of policies is a important if not more than policy- making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

### **2. Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta, maka dapat dikatakan kalau partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompoknya.

Kajian akan beberapa literatur menyebutkan partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan



bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley (1991:1-10) mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
- b. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu:
  - 1) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan).
  - 2) Sumbangan materi (dana, barang, alat).
  - 3) Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja).
  - 4) Memanfaatkan/ melaksanakan pelayanan pembangunan.
- c. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

### 3. Pemahaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, Visi PNPM adalah Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Misi PNPM adalah memberdayakan masyarakat

perdesaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat.
- e. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM, strategi yang dikembangkan PNPM yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) sebagai kelompok sasaran dan penguatan sitem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Melalui PNPM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sedangkan tujuan dari PNPM adalah :

- a. Tujuan Umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Tujuan Khususnya meliputi :
  - 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
  - 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
  - 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
  - 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
  - 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
  - 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa.
  - 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan.

PNPM mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM dengan prinsip-prinsip yang meliputi sebagai berikut:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i. Prioritas. Pengertian prinsip Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Langkah pelaksanaan PNPM pada dasarnya terdiri serangkaian kegiatan di berbagai tataran yaitu pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (parallel) atau menerus. Kelompok kegiatan tersebut dipilah menjadi 3 tahapan besar tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Proses Perencanaan
- b. Proses Pelaksanaan (actual implementation)
- c. Proses Pelestarian

Pelaku utama PNPM pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian adalah masyarakat. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis

menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Talang Leak I.
2. Ketua BPD Talang Leak I.
3. Tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
4. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Desa Talang Leak I.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data  
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data  
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat

hubungan antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Hasil Penelitian**

Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong merupakan salah satu desa yang mengalami wilayah hasil pemekaran kecamatan. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten baru yang terus mengalami perubahan struktur administrasi kewilayahan daerah. Desa Talang Leak I secara administratif terbagi menjadi 3 (tiga) dusun dengan luas wilayah 7.900 m<sup>2</sup>, yang mana tipologi desa masuk dalam kategori desa di sekitar hutan. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan terdekat 1000 m dengan lama tempuh berkisar 1 menit, sedangkan jarak menuju ibukota kabupaten 19 km<sup>2</sup> dengan lama tempuh 1 jam. Desa Talang Leak I yang memiliki penduduk dari berbagai etnis antara lain ; etnis Rejang, Serawai, Jawa, Padang dan Medan.

Desa Talang Leak I sebagian besar adalah wilayah dataran rendah dan selebihnya adalah perbukitan atau pegunungan. Suhu di Desa Talang Leak I rata-rata 23<sup>0</sup>C, adapun iklim di Desa Talang Leak I sama dengan iklim yang terdapat di desa-desa lain di wilayah Indonesia yang beriklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan hujan, namun musim hujan lebih dominan daripada musim kemarau.

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk desa Talang Leak I sampai dengan akhir tahun 2010 berjumlah 1884 jiwa dengan 537 KK. Adapun jumlah penduduk dari tiga dusun yang ada di desa Talang Leak I dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Penduduk Desa Talang Leak I**

Lingkungan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Jumlah (KK)
Dusun I	320	315	635	180
Dusun II	300	305	605	157
Dusun III	344	300	644	200
<b>Jumlah</b>	<b>964</b>	<b>920</b>	<b>1884</b>	<b>537</b>

Sumber data: profil Desa Talang Leak I

Penduduk desa Talang Leak I keseluruhan penduduknya memeluk agama islam yaitu sebanyak 100% atau sebanyak 1884 jiwa. Corak kehidupan masyarakat di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu “gemeinschaft” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan “face to face group” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal diri sendiri”. (Wasistiono,2006:11). Walaupun terdapat perbedaan diantara mereka namun itu tidak menjadikan mereka berbeda baik dari segi agama, suku, pendidikan maupun ekonomi.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Talang Leak I beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai buruh swasta, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang bisnis jual beli dan Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Pembahasan

Tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan adanya bentuk sinergis antar peran birokrasi dengan keterlibatan aktif setiap masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Partisipasi masyarakat yang bersifat aktif dalam pembangunan infrastruktur fisik, adalah bentuk kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri.

Adanya keterlibatan itu, maka suatu

pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan.

Partisipasi juga harus ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan. Pengertian akan partisipasi ini menekankan pada paradigma bottom up pada administrasi pembangunan, dimana elemen terpenting dalam pembangunan adalah dengan adanya modal sosial yang kuat dan memberikan sumbangsih dalam setiap kebutuhan pembangunan.

Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tingkat partisipasi masyarakat di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Perlu diketahui bahwa di desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong terdapat beberapa kegiatan proyek PNPM itu sendiri dan dibentuknya kelompok keanggotaan setiap proyek yang ada, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2 Daftar Kelompok Keanggotaan Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Di Desa Talang Leak I**

No	Pelaksana	Struktur Keanggotaan	
1	LKD Junjung Harapan	Ketua	: L. Rozeko
		Sekretaris	: Zulhairi
		Bendahara	: Hendri
		Anggota	: Didi Darmadi, Perizen, Iwan Gunawan, Muran, Tamsir, Muslim, Ibrahim, Murman, Muraini dan Asnawi



2	LKB Macan Tutul	Ketua	:	Robi Herianto
		Sekretaris	:	Yus Hendra
		Bendahara	:	Novi
		Anggota	:	Wanca, Zinni, Johari, Hen, Roni, Sadi, Sinim, Wahidi, Rendek, Judi dan Jaya

Adapun kegiatan PNPM yang bergulir merupakan proyek pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT). Proyek ini merupakan bentuk pembangunan infrastruktur fisik dalam membantu para petani untuk mendapatkan akomodasi berupa akses jalan yang baik.

Kegiatan diatas akan dianalisis secara kualitatif dengan ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang; dan partisipasi uang.

a. partisipasi pikiran

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek PNPM-MP tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dilaksanakan pada desa Talang Leak I.

Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Desa Talang Leak I bahwa: “Memperjuangkan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Talang Leak I bukanlah upaya baru. Masyarakat Desa Talang Leak I sangat membutuhkan adanya akses jalan terpadu dalam kegiatan usaha tani dan akses pengangkutan yang efektif dengan didukungnya infrastruktur yang baik. Akhirnya upaya tersebut baru terealisasi pada tahun 2011. Keputusan akan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) bukanlah merupakan keputusan Kepala Desa dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari warga desa

utamanya tokoh-tokoh masyarakat” (Kades Talang Leak I, hasil wawancara September 2013).

Ungkapan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut, tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri, akan tetapi itu juga merupakan keinginan warga desa secara keseluruhan.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, bahwa: “Pada saat kegiatan dikerjakan, banyak anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya, tanpa dibayar. Mereka datang bekerja karena menyadari akan pentingnya JUT yang merupakan kebutuhan bersama.” (Tokoh Masyarakat, hasil wawancara September 2013).

b. Partisipasi Tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik PNPM-MP. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berabagai pekerjaan atas dasar gotong-rotong atau swadaya.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak L. Rozeko bahwa banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan kegiatan, hal ini atas dasar kesadaran. Olehnya itu, meskipun tersedia anggaran untuk proyek tersebut, namun mereka tidak berharap untuk dibayar.

Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan juga oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat Desa Talang Leak I ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP, terutama dalam bentuk partisipasi tenaga. Memang harus diakui bahwa masyarakat Desa Talang Leak I dapat dikatakan cukup partisipatif dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desanya. Akan tetapi harus diakui pula bahwa masih banyak diantara mereka yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari.

Informasi diatas memperlihatkan bahwa partisipasi seseorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak.

c. Partisipasi Keahlian

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja.

Hal diatas indikasikan bahwa: (a) terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian; (b) tanggung jawab terhadap kualitas hasil, lebih tinggi pada proyek PNPM-MP dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh proyek-proyek yang ditangani oleh pihak ke-3; dan (c) pemeliharaan terhadap proyek PNPM-MP lebih baik dari pada pemeliharaan terhadap hasil-hasil proyek yang ditangani oleh pihak ketiga.

Hal ini dapat dimaklumi, karena proyek PNPM-MP oleh masyarakat Desa Talang Leak I dianggap sebagai milik sendiri, sedangkan proyek yang ditangani pihak ke-3 dianggap sebagai milik negara atau daerah yang harus dijaga dan dirawat oleh negara atau daerah.

Sesuai yang dikemukakan oleh Kepala BPD, bahwa: "Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi

yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya". (Kepala BPD, hasil wawancara September 2013)

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa kerelaan masyarakat untuk menyumbangkan keahlian mereka dalam pembangunan desanya adalah cukup tinggi. Mereka tetap bekerja dengan baik, meskipun upah yang mereka terima seadanya saja. Artinya upah bukanlah faktor utama dalam berpartisipasi, melainkan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.

d. Partisipasi Barang

Barang yang dimaksudkan adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP. Dalam proyek JUT ini, tentunya dana yang dialokasikan belumlah cukup untuk pemenuhan seluruh kegiatan program. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan.

Dari adanya bantuan yang dimaksud maka pengeluaran pembangunan fisik dapat ditekan sehingga sisa modal yang ada selanjutnya dapat digunakan untuk beberapa pembiayaan kegiatan yang belum dapat dianggarkan.

Jika dipandang dari sudut ekonomi, sesungguhnya masyarakat desa Talang Leak I bukanlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan, sehingga sebagian dari harta mereka itu disumbangkan kepada desa. Akan tetapi, meskipun kehidupan mereka masih dalam taraf sederhana, mereka tetap rela untuk menyumbangkan sebagian dari milik mereka untuk kepentingan pembangunan desa. Hal ini cukup memberikan nilai positif pada bentuk partisipatif masyarakat desa Talang Leak I dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa secara keseluruhan.

e. Partisipasi Uang

Semua informan yang terlibat, berpartisipasi pada kegiatan yang

dijelaskan diatas. Hal ini mengidentifikasi pula mengenai keterlibatan mereka untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan uang guna mendukung pembangunan selama kurang lebih empat bulan.

Hal diatas dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangsih mereka dalam membelikan rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek.

Dengan adanya partisipasi ini, anggaran dana yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatan dapat digunakan secara hemat, sehingga nantinya dana yang di anggarkan akan apat digunakan lagi untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat lagi.

Dari analisis yang telah dilakukan diatas, diperlukannya sebuah kebijakan yang tepat agar masyarakat aktif berpartisipasi di dalam pembangunan, sehingga tujuan dari PNPM-MP dapat tercapai secara maksimal.

Adapun kebijakan yang diharapkan tersebut diantaranya adalah:

1. Perencanaan pembangunan partisipatif harus konsisten dan serius dari semua pihak dalam pelaksanaan PNPM-MP.
2. Optimalisasi peranan stakeholder terkait terutama Konsultan/fasilitator dan tokoh masyarakat.
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui media massa. Masyarakat tidak hanya mengetahui tentang program dari pertemuan yang dihadiri, tetapi juga dapat mengetahui dari media formal maupun informal yang ada.

Ketiga garis besar kebijakan diatas perlu didukung dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
2. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait
3. Penyebarluasan tentang PNPM-MP melalui media massa serta adanya peningkatan pendidikan informal kepada masyarakat sebagai upaya penguatan modal sosial masyarakat.

#### E. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan berupa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Talang Leak I, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka.
2. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP.
3. Kepala Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP tersebut, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Korten, David C dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oakley, P, et al. 1991. *Project with People, The Practice of Participant in Rural Development*. Geneva: International Labour Office
- Solochin Abdul Wahab. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Impleentasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

##### Dokumen dan Sumber Lainnya

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional